

DAFTAR PUSTAKA

- Aryanto, Rudy. 2011. "Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan". *Jurnal ILMIAH* Volume III No.2,2011
- Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit BPPE, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Boedi, Sulistijono. 2012. "*Jurnal Analisis Kinerja Keuangan pada APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar*".
- David, Kaluge dan Ida Ayu Purba Riani. 2011 . "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah Pemekaran di Provinsi Papua".
- Dwijayanti, Retno dan Ruserlistyanti. 2013. "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Propinsi Seindonesia".
- Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.
- Irwan Prayitno. (1 September 2016). [Pertumbuhan Ekonomi Sumbar Tertinggi](http://irwan-prayitno.com/2016/09/pertumbuhan-ekonomi-sumbar-tertinggi/). Diperoleh 29 januari 2017, dari <http://irwan-prayitno.com/2016/09/pertumbuhan-ekonomi-sumbar-tertinggi/>
- Mardiasmo, 2004. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Nurcholis, hani.2007. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta,.
- Paat, Selly. 2013. "Perbandingan Kinerja Pengelolaan Apbd Antara Pemerintah Kota Tomohon Dengan Pemerintah Kota Manado".
- Pramono, Joko. 2014. *Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Among Makarti, Vol.7 No.13, Juli 2014.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor17 Tahun 2003 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Daerah.
- _____. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- _____. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- _____. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang tentang Pemerintah Daerah.

_____. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

_____. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1994 Jo 1996 tentang cara penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD.

_____. Peraturan Pemerintah No. 97 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

_____. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintah Daerah.

Ramandei, P. 2009. "Pengaruh karakteristik Sasaran Anggaran dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Manajemen". *Tesis*, Universitas Diponegoro

Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis, Edisi 4*, Buku 1, Salemba Empat, Jakarta.

Susanto, Hery dan I Dewa Gde Bisma. 2010. "Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007".

Thesaurianto, Kuncoro. 2007. *Analisis Pengelolaan Keuangan daerah terhadap Kemandirian Daerah*. Tesis tidak diterbitkan. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

Umminah, Puti. 2013. "Analisa perbandingan kinerja keuangan antara pemerintahan kabupaten provinsi aceh dan provinsi riau tahun 2010-2012".

Umar, Arif Maulana. 2015. "Analisis perbandingan kinerja keuangan daerah antara Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam".

Wulansari, Dini. 2015. "perbandingan kinerja keuangan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Jambi tahun 2011-2013".

Wahyuni, N. 2010. Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang. *EL-Muhasaba*, (Vol.1 No.1;01-2010). <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/el-muhasaba/article/view/1879/> pdf diakses tanggal 29 januari 2017

Werimon, dkk. 2007. Pengaruh Partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).

www.bukittinggikota.go.id

www.payakumbuhkota.go.id